



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

EDISI 1



LKIP 2025



DINAS KOMINFO LAMBAR



@KOMINFOLAMBAR



DISKOMINFO LAMBAR

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	2
D. Peran Strategis Perangkat Daerah.....	3
E. Isu Strategis	4
II. PERENCANAAN KINERJA	6
A. Rencana Strategis	6
1. Strategi dan Arah Kebijakan	7
2. Program dan Kegiatan Pembangunan.....	13
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Kerangka Pendanaan	13
C. Target Kinerja Tahun 2025 Menurut Renstra	16
III. KAPASITAS ORGANISASI	21
A. Analisis Sumber Daya Manusia	21
B. Analisis Sarana dan Prasarana	24
C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025	34
IV. AKUNTABILITAS KINERJA	39
A. Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi LHE Inspektorat	39
B. Capaian Kinerja	41
1. Faktor-faktor Penghambat Capaian Kinerja SPBE	43
2. Faktor-faktor Keberhasilan Capaian Kinerja.....	44
3. Gambaran Peta Proses Bisnis Pendukung Capaian Kinerja	44
C. Perbandingan Kinerja	45
1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya.....	45
2. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional	48
3. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Provinsi	49
D. Benchmarking	49
E. Realisasi Anggaran	51
F. Pemanfaatan Laporan Kinerja	55
G. Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi LHE Nasional	55
V. PENUTUP	56
A. Simpulan Umum	56
B. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja.....	56
C. Permasalahan dan Solusi.....	57



DAFTAR TABEL

Tabel V-1-1 Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025...	v
Tabel II-1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2023-2026...	8
Tabel II-2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja Tahun 2023-2026.	11
Tabel II-3 Indikator Kinerja Utama	11
Tabel II-4 Program dan Kegiatan.....	13
Tabel II-5 Perjanjian Kinerja	14
Tabel II-6 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025	16
Tabel II-7 Target Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025	16
Tabel III-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	21
Tabel III-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	22
Tabel III-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Rumpun Jawaban.....	23
Tabel III-4 Jumlah Pegawai berdasarkan Diklat Penjenjangan	24
Tabel III-5 Daftar Sarana dan Prasarana Tahun 2025	24
Tabel III-6 Pagu Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 .	36
Tabel IV-1 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024	40
Tabel IV-2 Capaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Tahun 2025	41
Tabel IV-3. Indeks SPBE se-Provinsi Lampung Tahun 2025	50
Tabel IV-4. Indeks PEMDI se-Provinsi Lampung Tahun 2025.....	51
Tabel IV-5. Realisasi Anggaran Tahun 2025	52
Tabel V-1 Permasalahan dan Solusi.....	57



DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika.....	3
Gambar III-1 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
Gambar III-2 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan	23
Gambar III-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan.....	24
Gambar III-4 Proporsi Anggaran Tahun 2025	35
Gambar IV-1 Peta Proses Bisnis	45
Gambar IV-2 Capaian indeks SPBE Tahun 2023, 2024 dan 2025.....	46
Gambar IV-3. Capaian indeks PEMDI Tahun 2023, 2024 dan 2025.....	46
Gambar IV-4. Perbandingan Indeks PEMDI Nasional dan Kabupaten	48
Gambar IV-5. Perbandingan Indeks PEMDI Provinsi dan Kabupaten	49

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 dapat tersusun.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2025. Penyusunan Laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama 1 (satu) tahun yang akan menjadi sumber informasi dan referensi untuk bahan penyusunan perencanaan, perbaikan peningkatan kinerja pada waktu yang akan datang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras sama degan baik dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini. Semoga dapat bermanfaat khususnya untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Liwa, 30 Januari 2026

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,




BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
Pembina Utama Muda
NIP 197109241998031005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis.

Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Dalam dokumen perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang akan dicapai yaitu Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis Digital. Berkaitan dengan pencapaian sasaran strategis tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat, melaksanakan 5 (lima) program, 1 (satu) program penunjang dan 4 (empat) program teknis, antara lain:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika;
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan
5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi.

Adapun uraian pencapaian kinerja dari indikator sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel V-1-1 Target Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Tujuan	Formulasi Indikator Sasaran PD	Target
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis Digital	Nilai Indeks PEMDI	Pengukuran indeks PEMDI Oleh Kemenpan-RB	1,30

Sumber : LHP SPBE 2025

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Lampung Barat, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan pertanggungjawaban kinerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, maka di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 29

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. Tugas dan Fungsi

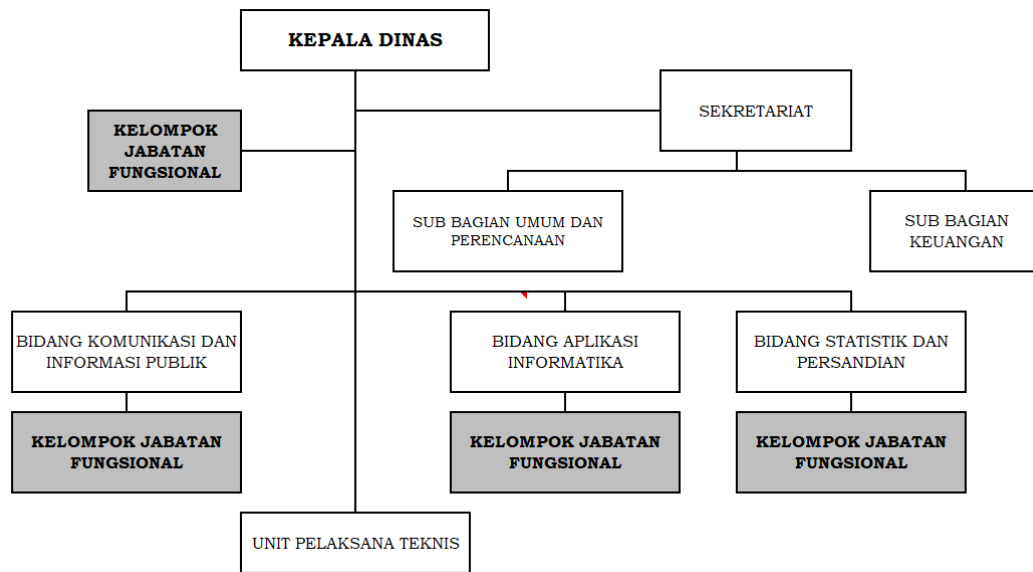
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Barat dan sesuai dengan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika;
3. Pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan bidang Komunikasi dan Informatika;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Komunikasi dan Informatika; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini:

Gambar I-1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



D. Peran Strategis Perangkat Daerah

Pada hakikatnya pembangunan sebagai proses perubahan yang terus menerus berlangsung, merupakan kemajuan dan perbaikan menuju arah yang ingin dicapai dalam meningkatkan kualitas hidup manusia termasuk perubahan dalam diri manusia itu sendiri, masyarakat dan lingkungannya. Pembangunan merupakan bagian dari satu kesatuan sistem pembangunan yang dilaksanakan oleh semua komponen masyarakat dan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keberhasilan dalam pembangunan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam membangun teknologi informasi dan komunikasi yang dilaksanakan secara menyeluruh, terarah dan terpadu sehingga kualitas teknologi informasi dan komunikasi itu sendiri dapat diselaraskan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh sektor pembangunan.

Pembangunan dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten Lampung Barat merupakan bagian integral pembangunan nasional di bidang transformasi digital dalam rangka menciptakan teknologi informasi dan komunikasi berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas. Usaha demikian harus terus menerus dipacu dan diupayakan secara terarah, terprogram dan berkesinambungan.

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu unsur pemerintah yang bertanggungjawab dalam rangka peningkatan kualitas, pelaksanaan integrasi, dan kesinambungan teknologi informasi dan komunikasi di daerah, maka perlu untuk menyusun program dan kegiatan baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga kontribusi bagi pembangunan bangsa terutama Transformasi Digital sesuai dengan tuntutan yang diperlukan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah membawa konsekuensi bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai Dokumen Perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun pertama dari periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat perlu menyusun Rencana Strategis sebagai dokumen perencanaan agar mampu berkiprah secara maksimal dalam sumbangsihnya meningkatkan kualitas teknologi informasi menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Rencana Strategis ini merupakan pegangan umum pelaksanaan teknis operasional di jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat yang diformulasikan dalam bentuk program aksi atau kegiatan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsi dan pelaksanaannya terkoordinasi dengan menyesuaikan kemampuan dana yang tersedia dan kondisi yang ada.

E. Isu Strategis

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat antara lain adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Kualitas Publikasi Perencanaan, Penganggaran, dan Keuangan Serta Program dan Kegiatan Pemerintah;



2. Rendahnya Nilai Indeks SPBE dengan Predikat Cukup;
3. Belum tersedianya Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE untuk pengembangan SPBE di Kabupaten Lampung Barat;
4. Rendahnya pembangunan jaringan intra pemerintah daerah;
5. Rendahnya kualitas penggunaan sistem penghubung layanan pemerintah;
6. Rendahnya kualitas keamanan sistem informasi; dan
7. Belum optimalnya kualitas dan penyediaan data statistik sektoral dan spasial.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat yang ditetapkan untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan Tahun 2026 Penetapan jangka waktu 4 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati Lampung Barat terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat tersebut ditujukan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPD Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), RPD, Forum SKPD sehingga Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat dan *stakeholders*.

Selanjutnya, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat tersebut akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

Strategi dan arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Komunikasi dan Informatika berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, efisiensi birokrasi, serta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintahan. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat integrasi antara kebijakan teknologi dan operasional pemerintah, serta memastikan setiap kebijakan dapat mendukung transformasi digital di berbagai sektor pelayanan publik.

Melalui penguatan infrastruktur TIK, pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta penerapan sistem yang terstandarisasi dan terintegrasi antar lembaga, diharapkan dapat tercipta sebuah pemerintahan yang lebih modern, responsif, dan berbasis data. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pentingnya perlindungan data dan keamanan informasi untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan yang ada.

Berikut dijabarkan rumusan strategi dan arah kebijakan pada tabel dibawah ini:

Tabel II-1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis digital	Tewujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis digital	1. Keamanan Siber - o Pembentukan CSIRT Daerah. - o Audit keamanan berkala terhadap sistem. - o Penerapan kriptografi nasional.	Mewujudkan Pemerintah Digital Terintegrasi dan Andal , dengan fondasi pada keamanan, data, dan layanan.
			2. Kapabilitas dan Budaya Digital ASN o Pelatihan literasi dan kepemimpinan digital. Penunjukan agen transformasi digital di setiap perangkat daerah.	Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Pemerintahan , melalui digitalisasi proses layanan dan akuntabilitas berbasis data.
			3. Pengelolaan Data dan Interoperabilitas - o Implementasi API dan <i>web service</i> antar sistem. - o Penguatan <i>metadata</i> statistik dan <i>validata</i>.	Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Layanan Digital , dengan platform yang inklusif dan mudah diakses.

			o Pemanfaatan <i>big data</i> dan data terbuka.	
			4. Layanan Digital Terpadu - o Layanan berbasis siklus hidup. - o Integrasi ke portal nasional pelayanan publik. - o Pemanfaatan Identitas Kependudukan Digital (IKD).	Menyesuaikan Transformasi Digital Daerah dengan Arah Nasional, berdasarkan RPJMN 2025–2029, SPBE Nasional, dan Indeks Pemdi.
			5. Kepuasan Pengguna - o Survei pengguna layanan digital. - o <i>Redesign</i> layanan berbasis <i>feedback</i> pengguna.	Membangun Ekosistem Digital yang Kolaboratif, antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat.
			6. Perencanaan dan Tata Kelola - o Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE. - o Integrasi dengan RPJMD dan Renstra Nasional.	
			7. Teknologi dan Infrastruktur Digital o Penerapan	



			SDLC / <i>agile</i> dalam pengembangan aplikasi. ○ Migrasi ke Pusat Data Nasional. ○ Penguatan jaringan dan perangkat.	
			8. Audit dan Evaluasi Digital ○ Audit menyeluruh atas aplikasi, data, dan infrastruktur. ○ Tindak lanjut hasil audit.	
			9. Inovasi dan Kolaborasi Digital ○ Pembentukan forum kolaborasi digital daerah. ○ Kemitraan dengan kampus dan <i>startup</i>.	

Sumber: Renstra Kominfo 2023-2026

Selanjutnya Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat **“*Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis Informasi dan Teknologi*”**.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan maka harus mempunyai sasaran, adapun sasaran harus sesuai indikator Utamanya. Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai dengan tujuan adalah **“*Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi Publik*”**.



Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026 sebanyak 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana tujuan yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat sebagai berikut :

Tabel II-2 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis digital	Tewujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis digital	Nilai Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50

Sumber : Renstra Kominfo 2023-2026

Tabel II-3 Indikator Kinerja Utama
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	PENJELASAN		TARGET					DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULA SI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis Digital	Nilai Indeks Pemerintahan Digital	Indeks Poin	Jumlah Total Hasil Perkalian Dari Bobot Aspek Dikalikan Satu Per Seratus	Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 21 April 2025 Tentang Pembinaan kepada Instansi Pemerintah pada Tahun 2025 dalam Rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna. Untuk memastikan pelaksanaan Pemdi di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu. Gukuran Indeks PEMDI terdiri dari beberapa Aspek: 1. Strategi dan Rencana Bobot 5% 2. Tata Kelola dan Manajemen Bobot 5% 3. Teknologi Digital Bobot 20% 4. Audit Teknologi Digital Bobot 6% 5. Keamanan Siber Bobot 9% 6. Kapabilitas dan Budaya Digital Bobot 10% 7. Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Bobot 10% 8. Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah Bobot 15% 9. Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah Bobot 20%
----	--	-----------------------------------	-------------	--	---	------	------	------	------	------	--

Sumber: IKU Kominfo 2023-2026

2. Program dan Kegiatan Pembangunan

Dalam upaya pencapaian target pada Rencana Strategis di Tahun 2023-2026, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat didukung oleh 5 program dan 12 kegiatan. Program dan kegiatan tersebut ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II-4 Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Program	Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
		Administrasi Barang Milik Daerah
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
		Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Penyelenggara Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sumber : Renstra Kominfo 2023-2026

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Kerangka Pendanaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, perjanjian kinerja harus disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima dokumen pelaksanaan anggaran, paling lambat satu bulan setelah dokumen anggaran disahkan.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel II-5 Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tewujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis digital	Nilai Indeks PEMDI	1,30

NO	PROGRAM	ANGGARAN
----	---------	----------



1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	RP. 3.220.712.406
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	RP. 3.342.514.000
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 1.133.862.500
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	Rp. 123.001.000
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 394.039.100
Jumlah		Rp. 8.214.129.006

Sumber : Perjanjian Kinerja Kominfo Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat memiliki 1 sasaran yaitu **“Tewujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis digital”**, dan 1 Indikator kinerja yaitu Nilai Indeks PEMDI dengan target kinerja sebesar 1,30 dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 8.214.129.006.

**Tabel II-6 Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tewujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis digital	Nilai Indeks PEMDI	1,30

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/kota	Rp. 3.073.607.243
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.849.294.000
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 1.101.439.500
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 131.425.400
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 197.677.600
Jumlah Rp.		Rp. 7.353.443.743

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Kominfo Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan bahwa perjanjian kinerja perubahan yang disusun tidak mengubah target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja perubahan yang disusun hanya mengubah dukungan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

C.Target Kinerja Tahun 2025 Menurut Renstra

Berdasarkan Rencana Strategis yang telah ditetapkan maka target kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat, tahun 2025 adalah sebagai berikut :

**Tabel II-7 Target Kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Subkegiatan (Output)
1	2	4	5
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berbasis digital	Tewujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis digital	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah
		Perencanaan, Penganggaran, dan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Subkegiatan (Output)
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
		Administrasi Umum	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Subkegiatan (Output)
		Perangkat Daerah	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks Keterbukaan Informasi Publik
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi di Dewan Pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3.



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Subkegiatan (Output)
			aktif dalam kegiatan relasi media
			Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo
			Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah
			Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis
		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)
		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Pusat Data Nasional
			Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
			Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
			Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas
			Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas
		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
		Penyelenggara Statistik Sektoral di lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
			Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan



TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Subkegiatan (Output)
			Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
			Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi

Sumber data : Renstra Kominfo 2023-2026

BAB III

KAPASITAS ORGANISASI

A. Analisis Sumber Daya Manusia

Peran Aparatur Sipil Negara adalah sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oleh karena itu, peran Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat strategis dalam keberhasilan pembangunan nasional maupun daerah sebagai generator penyelenggara pembangunan. Karena peran Aparatur Sipil Negara yang sangat strategis tersebut, Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Begitupun di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat, Aparatur Sipil Negara merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan.

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat periode 31 Desember 2025 sebanyak 26 orang. Profil demografi ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat di bawah ini :

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dari 26 orang ASN dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel III-1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	Jumlah
1	Sarjana Strata 2	6 Orang
2	Sarjana Strata 1	18 Orang
3	SMA	2 Orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2025

Gambar III-1 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2025

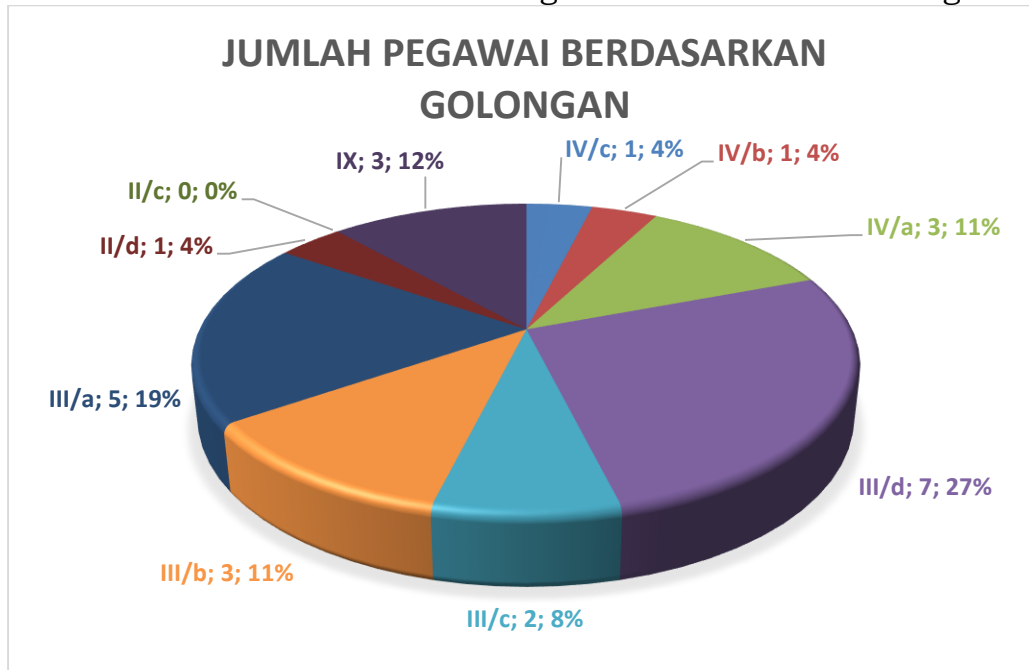
2. Berdasarkan Kepangkatan/Golongan, dari 26 Orang ASN tersebut dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel III-2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda	IV/c	1 Orang
2	Pembina Tingkat I	IV/b	1 Orang
3	Pembina	IV/a	3 Orang
4	Penata Tingkat I	III/d	7 Orang
5	Penata	III/c	2 Orang
6	Penata Muda Tingkat I	III/b	3 Orang
7	Penata Muda	III/a	5 Orang
8	Pengatur Tingkat I	II/d	1 Orang
9	Pengatur	II/c	-
10	Pratama	IX	3 Orang

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2025

Gambar III-2 Grafik Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan



Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2025

3. Berdasarkan rumpun jabatan, dari 26 Orang ASN tersebut dapat dilihat pada tabel sebagaimana tersebut di bawah ini :

Tabel III-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Rumpun Jawaban

No.	Rumpun Jabatan	Jumlah
1	Struktural	7
2	Fungsional	7
3	Fungsional Umum	12
Jumlah		26

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2025

4. Berdasarkan Pendidikan Penjenjangan yang pernah diikuti, maka dari Jumlah Pejabat Struktural sesuai eselon terdapat beberapa yang belum mengikuti Diklat Penjenjangan sebagai terlihat dalam Tabel di bawah ini :

Tabel III-4 Jumlah Pegawai berdasarkan Diklat Penjenjangan

No	Pendidikan	Jumlah
1.	SPAMEN / PIM II	-
2.	SPAMA/PIM III	2
3.	ADUM/PIM IV	8

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2025

Gambar III-3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Diklat Penjenjangan



Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2025

B. Analisis Sarana dan Prasarana

Data Sarana dan Prasarana yang masih terpakai (dapat dipergunakan) Adapun sarana pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat yaitu :

Tabel III-5 Daftar Sarana dan Prasarana
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No	Nama Barang	Uraian	Tahun Perolehan	Jumlah	Satuan
1	Tanah Bangunan Menara Telekomunikasi Seluler BTS	Pekon Pancur Mas Kec, Lumbok Seminung/Jalan	2020	324,00	M2



		Raya Pancur Mas, Desa Pancur Mas, Kec. Lumbok Seminung, Kab. Lampung Barat			
2	Generating Set	Dishubkominfo	2015	1	Unit
3	Genset	Diskominfo	2017	1	Unit
4	Genset Daimaru DMH78005	DAIMARU	2018	1	Unit
5	Sepeda Motor	Honda/MCB/BE 5209 MZ	2002	1	Unit
6	Minibus	Toyota/Kijang LX/BE 2105 MZ	2004	1	Unit
7	Sepeda Motor	Honda/MCB Win/BE 5303 MZ	2005	1	Unit
8	Minibus	Toyota/Rush 1.5 G/BE 36 M	2012	1	Unit
9	Sepeda motor	Kawasaki/BE 6155 MZ	2012	1	Unit
10	Sepeda Motor	Kawasaki/KLX 150S/BE 6176 MZ	2013	1	Unit
11	Mobile M-MUSTIKA (Pick Up)	Isuzu/Bison/ B 9943 PQU	2013	1	Unit
12	Sepeda Motor	Kawasaki/KLX 150 G/BE 6265 MZ	2016	1	Unit
13	Sepeda Motor	Honda/Beat Street CBS (Vin 2019)/BE 6514 MZ	2020	1	Unit
14	Minibus	Toyota/Kijang LX/BE 1057 MZ	2004	1	Unit
15	GPS / Garmin	Dinas Hubinfokom	2013	1	Unit
16	Batere (Cadangan)	Canon LP-E6	2018	2	Unit
17	Battery Handycam	Diskominfo	2020	2	Unit
18	Termometer	Diskominfo	2021	2	Unit
19	Portable Handheld Printer	CP-2000 SE	2022	2	Unit
20	Lemari Arsip	Balik Bukit	1995	1	Unit
21	Lemari	Balik Bukit	1997	1	Unit
22	Brankas	Balik Bukit	1997	1	Unit
23	Meja Kaca Panjang	Balik Bukit	2000	2	Unit
24	Rak Buku	Balik Bukit	2002	1	Unit
25	Meja Biro	Balik Bukit	2002	2	Unit
26	Meja Kerja R Fraksi	Balik Bukit	2003	1	Unit
27	Kursi Kerja R Sekretariat	Balik Bukit	2003	5	Unit
28	Papan Struktur	Balik Bukit	2004	1	Unit
29	Meja Komputer	Balik Bukit	2007	1	Unit
30	Kursi Tamu	Balik Bukit	2007	1	Unit
31	Meja Kerja	Balik Bukit	2007	8	Unit
32	Filling Kabinet	Balik Bukit	2007	1	Unit
33	Lemari Arsip Besi	Balik Bukit	2008	1	Unit
34	Filling Kabinet	Balik Bukit	2008	2	Unit
35	sice	Balik Bukit	2011	1	Unit
36	Kursi lipat	Balik Bukit	2011	1	Unit
37	Kursi putar	Balik Bukit	2011	2	Unit
38	Meja 1/2 biro	Balik Bukit	2011	6	Unit
39	Meja biro	Balik Bukit	2011	4	Unit
40	Filling Kabinet	Balik Bukit	2011	2	Unit
41	Sofa	Balik Bukit	2012	1	Unit
42	Meja 1 Biro	Balik Bukit	2012	1	Unit
43	Kursi Putar	Balik Bukit	2012	4	Unit
44	Lemari Arsip	Balik Bukit	2012	1	Unit
45	Filling Kabinet	Dermaga/Pelabuhan	2012	1	Unit
46	Tirai/Gorden	Balik Bukit	2012	1	Unit



47	Papan Data	Balik Bukit	2012	4	Unit
48	Kursi Lipat	Balik Bukit	2012	2	Unit
49	Pemadam Kebakaran	Diskominfo	2013	1	Unit
50	AC	Diskominfo	2013	1	Unit
51	DVD Player	Diskominfo	2013	1	Unit
52	Stabilizer	Diskominfo	2013	1	Unit
53	Inverter	Diskominfo	2013	1	Unit
54	Kursi Putar	Diskominfo	2013	1	Unit
55	Plasma TV 51"	Diskominfo	2013	1	Unit
56	Screen LCD	Diskominfo	2013	1	Unit
57	LCD Projector	Diskominfo	2013	1	Unit
58	Absen Sidik Jari	Alat Kantor Lainnya	2015	1	Unit
59	Open Rack	Rack Server	2015	1	Unit
60	Gordyn	Diskominfo	2016	6	Unit
61	Filling Cabinet	Diskominfo	2016	1	Unit
62	Kursi Tamu	Diskominfo	2016	1	Unit
63	Kursi Lipat	Diskominfo	2016	9	Unit
64	Kursi 1/2 Biro	Diskominfo	2016	1	Unit
65	Meja 1 Biro	Diskominfo	2016	1	Unit
66	Meja 1/2 Biro	Diskominfo	2016	3	Unit
67	AC 1/2 PK	Diskominfo	2016	2	Unit
68	UPS 3000 W	Diskominfo	2016	1	Unit
69	Brankas	Diskominfo	2017	1	Unit
70	CCTV	Diskominfo	2017	7	Unit
71	Mesin tik	Diskominfo	2017	1	Unit
72	Lcd / Infocus dan perlengkapannya	Diskominfo	2017	1	Unit
73	UPS	Diskominfo	2017	1	Unit
74	TV (60 inc)	Shap Aguos 153 Cm (60") Led BaclighTV	2018	1	Unit
75	Tas Kamera	Diskominfo	2018	1	Unit
76	LG TV 49	Igtv uj 632T	2018	1	Unit
77	TV Samsung	Diskominfo	2018	1	Unit
78	UPS/STABILIZER inferter Dc-Ac	Diskominfo	2018	2	Unit
79	Mega Pon	TDA 2 H -625 S	2018	2	Unit
80	Meja 1 Biro	Diskominfo	2018	2	Unit
81	Meja 1/2 Biro	Super	2018	11	Unit
82	Meja Kerja	Super	2018	5	Unit
83	Kersi 1 Biro	Prontiline	2018	1	Unit
84	Kursi 1/2 Biro	RAKUDA	2018	12	Unit
85	Kursi Lipat	Poenik	2018	20	Unit
86	Sofa Tamu	Sova	2018	1	Unit
87	AC	Panasonik	2018	2	Unit
88	Filing Kabinet	Diskominfo	2018	1	Unit
89	LED/Infocus	AUN AKEY1 PLUS	2018	1	Unit
90	Bilboard	Air Hitam Dan Way Tenong	2018	2	Unit
91	CCTV	Balik Bukit	2019	1	Unit
92	Standing Bracked 60 inc	Balik Bukit	2019	1	Unit
93	Power Supply	Balik Bukit	2019	1	Unit
94	TV Samsung 5250	Balik Bukit	2019	1	Unit
95	Stabilizer	Balik Bukit	2019	2	Unit
96	CCTV	Pasar Liwa (Videotron)	2019	1	Unit
97	Power Suplay	Diskominfo	2020	3	Unit
98	Gordyn 3 Meter	Diskominfo	2020	9	Unit



99	Gordyn 2 Meter	Diskominfo	2020	1	Unit
100	Gordyn 1 Meter	Diskominfo	2020	4	Unit
101	Gordyn 2,5 Meter	Diskominfo	2020	2	Unit
102	Gordyn 5 Meter	Diskominfo	2020	1	Unit
103	Ups Ica Gt 1682 B	Diskominfo	2020	1	Unit
104	PENGHANCUR KERTAS	SECURE/STRIP CUT	2020	1	Unit
105	Stabilizer	MATSUNAGA SVC-3000N	2020	1	Unit
106	TV	SAMSUNG 65 "	2020	1	Unit
107	ALMARI ARSIP	Diskominfo	2021	1	Unit
108	CCTV	Diskominfo	2021	2	Unit
109	MEJA RESEPSIONIS	Diskominfo	2021	1	Unit
110	Air Conditioner (AC)	Diskominfo	2021	1	Unit
111	Tangga Teleskopik	Diskominfo	2021	1	Unit
112	breket antena mobil	Diskominfo	2021	3	Unit
113	breket antena manual tower	Diskominfo	2021	3	Unit
114	MEJA 1/2 BIRO	Diskominfo	2021	2	Unit
115	Kursi Lipat	Diskominfo	2021	2	Unit
116	mikrofon	Saromonic	2021	2	Unit
117	Layar Proyektor	projection screen	2021	1	Unit
118	Proyektor	Epson	2021	1	Unit
119	Billboard	BNS & Suoh	2021	2	Unit
120	Microphone	WAVE	2021	1	Unit
121	TV CED Sharp 60 Inch	Sharp	2021	2	Unit
122	Camera Camcorder	Sony	2021	1	Unit
123	Braket Antena	HY-GAIN	2022	3	Unit
124	UPS	Takayoshi 3000 N	2022	1	Unit
125	Stavol	APC	2022	1	Unit
126	Braket Antena Mobil	HY-GAIN	2023	1	Unit
127	Microphone MIC (Streamlify)	BIDANG KIP/RADIO PRAJA	2024	1	Unit
128	Microphone MIC (Streamlify)	BIDANG KIP/RADIO PRAJA	2024	1	Unit
129	Power Boster Pendorong	Balik Bukit	2006	1	Unit
130	Power Suplay	Balik Bukit	2006	1	Unit
131	Radio Portabel	Balik Bukit	2007	10	Unit
132	Mesin Fax	Balik Bukit	2011	1	Unit
133	Telpon Seluler	Balik Bukit	2011	2	Unit
134	Pesawat Right	Balik Bukit	2013	2	Unit
135	Camera Digital	Diskominfo	2013	1	Unit
136	Sound System	Diskominfo	2013	1	Unit
137	Amplifier + Hom Speaker	Diskominfo	2013	1	Unit
138	Handy Talky	Diskominfo	2013	2	Unit
139	Kamera SLR Kit I	Balik Bukit	2014	1	Unit
140	Lensa Kamera SLR	Balik Bukit	2014	1	Unit
141	Video Tron	Pasar Liwa	2017	1	Unit
142	Speaker Sound System	Diskominfo	2018	1	Unit
143	Kamera	Canon EDS 80 D	2018	1	Unit
144	Drone	Dji Phantom 4 Pro	2018	1	Unit
145	Tripood	Takara VIT-283	2018	1	Unit
146	Micropone	Rode Micropon Pro	2018	1	Unit
147	Speaker Sound System	Panaray Sound Sistem	2018	1	Unit
148	Smartphone	Vivo V 7	2018	2	Unit
149	Radio Righ	Diskominfo	2018	3	Unit
150	Radio HT	Diskominfo	2018	6	Unit
151	Switcher/Menara Antena	Diskominfo	2018	1	Unit



152	Kamera	Sony	2018	1	Unit
153	Betere Drone	DJI Phantom 4 Pro	2018	1	Unit
154	Headphone	Diskominfo	2018	2	Unit
155	Telpon Seluler/HP	Balik Bukit	2019	1	Unit
156	Radio Righ Keywoord TM 281 A	Balik Bukit	2019	3	Unit
157	Lensa Tele	Balik Bukit	2019	1	Unit
158	Micropone	Balik Bukit	2019	1	Unit
159	Camera Nokon DS-200	Balik Bukit	2019	1	Unit
160	Sound System Was 112 WS	Balik Bukit	2019	1	Unit
161	Tablet Drone	Balik Bukit	2019	1	Unit
162	Tower Antena Komunikasi Kecamatan	Balik Bukit	2019	3	Unit
163	Tower Internet Kecamatan	Lumbok Seminung, Pagar Dewa, Kebun Tebu	2019	3	Unit
164	Pesawat HT Alinco	Diskominfo	2020	5	Unit
165	kamera Mirrorless	Diskominfo	2020	1	Unit
166	Lensa Tele Mirroless	Diskominfo	2020	1	Unit
167	Righ k 281	K-281	2020	3	Unit
168	Antena telex omny v2r-k	Diskominfo	2020	3	Unit
169	Tower Radio Komunikasi Kecamatan	Diskominfo	2020	3	Unit
170	Webcam	LOGITECH C930e	2020	3	Unit
171	Tripot	ZOME	2020	3	Unit
172	Mic wearles	ASHELAI PRO-1	2020	1	Unit
173	Speaker aktif	baretone	2020	1	Unit
174	mixer	QX1002	2020	1	Unit
175	Webcam	Diskominfo	2020	1	Unit
176	mixer soundcard extenrnal USB	Diskominfo	2020	1	Unit
177	micropophone + kabel set	Diskominfo	2020	1	Unit
178	speaker aktif	Diskominfo	2020	1	Unit
179	Clip On	Wireless	2021	1	Unit
180	Camera DSLR	Cannon	2021	1	Unit
181	Headsets	VH 200	2021	2	Unit
182	Headphone	play advanced	2021	2	Unit
183	Handphon	Oppo reno5	2021	1	Unit
184	Radio Righ	Kenwood	2021	8	Unit
185	antena omny tellex std USA	Diskominfo	2021	8	Unit
186	Antena Omni Telex STD USA	Diskominfo	2021	2	Unit
187	Antean Haster F23	Diskominfo	2021	1	Unit
188	Antena Omny Telex Lokal	Diskominfo	2021	2	Unit
189	tower Besi segitiga	Diskominfo	2021	2	Unit
190	Tiang Antena Bankom Super Stik	Diskominfo	2021	1	Unit
191	Antena Mobil Larse	Diskominfo	2021	1	Unit
192	Mixer	XENYX QX1222	2021	1	Unit
193	Speaker Aktif	HUPER	2021	1	Unit
194	Video Wall	Diskominfo	2021	1	Unit
195	Tower Radio Segitiga	-	2022	3	Unit
196	Antena Telexhygain (Omny STD USA)	HY-GAIN	2022	3	Unit
197	Radio Righ Kenwood TM-281	Kenwood	2022	3	Unit



198	Mic Condenser	Mr. BIG	2022	2	Unit
199	Antena Omny Telek Lokal	Kebun Tebu Dan Air Hitam	2022	2	Unit
200	Antena Omny STD USA	Kebun Tebu	2022	1	Unit
201	Antena Omny STD USA	Air Hitam	2022	1	Unit
202	Tower Triangle	Kubu Perahu	2022	2	Unit
203	Pemancar Radio	RVR TEX 2000 LIGHT	2022	1	Unit
204	Antena Telexhygain (Omny STD USA)	HY-GAIN	2023	2	Unit
205	Radio Righ Kenwood TM-281	Kenwood	2023	2	Unit
206	Speaker Wireless	Advance	2023	1	Unit
207	Ampli Maouno Caster Portable Podcast	MAONO AU-AM200	2023	1	Unit
208	Clip On Rode Wireless Go II 2	Rode Wireless Go II 2	2023	1	Unit
209	Mic Maono AU-A03	MAONO AU-A03	2023	2	Unit
210	Mic Maono PD 200x USB	MAONO PD 200X USB	2023	1	Unit
211	Antena Mobil Larsen Std USA	Super Gainer	2023	1	Unit
212	Radio Righ Kenwood TM - 281	Bstatistik dan Persandian	2024	2	Unit
213	Antena Omny Telex Lokal HY - GAIN	Bstatistik dan Persandian	2024	3	Unit
214	Breacket Antena Mobil Larsen	Bidang Statistik dan persandian	2024	3	Unit
215	Antena Omny Telex Lokal HY-GAIN	Bidang Statistik dan persandian	2024	2	Unit
216	Headphone Pioneer (S3 irlless)	BIDANG KIP/RADIO PRAJA	2024	2	Unit
217	Refeater	Balik Bukit	1997	1	Unit
218	Printer	Balik Bukit	2010	1	Unit
219	Komputer	Balik Bukit	2011	1	Unit
220	Komputer	Balik Bukit	2012	1	Unit
221	PC Komputer	Diskominfo	2013	1	Unit
222	Printer	Diskominfo	2013	1	Unit
223	Komputer Server	Komputer Unit/Jaringan	2015	1	Unit
224	Router	Peralatan Jaringan	2015	1	Unit
225	Hub/Switch	Peralatan Jaringan	2015	1	Unit
226	Wireless	Peralatan Jaringan	2015	1	Unit
227	Komputer PC	Diskominfo	2016	1	Unit
228	Printer PC	Diskominfo	2016	1	Unit
229	Monitor LED 19" (server)	Diskominfo	2016	2	Unit
230	Rack Server	Diskominfo	2016	2	Unit
231	Dlink Unmamageg Swicth	Diskominfo	2016	4	Unit
232	Router Mikrotik RB	Diskominfo	2016	2	Unit
233	Instalasi Jaringan Internet	Diskominfo	2016	1	Unit
234	Komputer Main Frame/Server	Diskominfo	2016	2	Unit
235	Komputer	Diskominfo	2017	2	Unit
236	Laptop	Diskominfo	2017	1	Unit
237	Printer	Diskominfo	2017	3	Unit
238	Acces Point	Diskominfo	2017	70	Unit
239	Hard disk	Diskominfo	2017	1	Unit
240	Refeater	Diskominfo	2017	1	Unit
241	Jaringan Internet Fiber Optic	Diskominfo	2017	1	Unit
242	Komputer Mainframe	Diskominfo	2017	1	Unit



243	Komputer	Cube Gaming	2018	1	Unit
244	Lap Top	Asus Vivobook core i5 A442 4R	2018	1	Unit
245	Hub Suit	Diskominfo	2018	30	Unit
246	Acces Poin Outdoor	Diskominfo	2018	4	Unit
247	Rovter Mikrotik	Diskominfo	2018	2	Unit
248	Komputer PC All In One	Me+	2018	3	Unit
249	Laptop Asus Vivo Book 4442U	Asus	2018	1	Unit
250	Printer	Epson L360	2018	3	Unit
251	PC All In One i5	Me+	2018	2	Unit
252	Printer	Samsung	2018	1	Unit
253	Modem	Huawei	2018	5	Unit
254	Hardisk External	Balik Bukit	2019	1	Unit
255	Laptop	Balik Bukit	2019	1	Unit
256	Acces Point Outdoor + Paket Mobile	Balik Bukit	2019	3	Unit
257	PC All In One Lenovo 330 Olid	Balik Bukit	2019	2	Unit
258	Printer Epson L3110	Balik Bukit	2019	1	Unit
259	Komputer/PC	Lenovo	2019	1	Unit
260	Printer	HP	2019	1	Unit
261	Router	GSM	2019	1	Unit
262	Akses Poin Outdoor	Diskominfo	2019	2	Unit
263	Router	Diskominfo	2019	1	Unit
264	Hub	Diskominfo	2019	1	Unit
265	Wireless Akses Point	Diskominfo	2019	2	Unit
266	Laptop	Asus A 455 LD-WX 050 51,52 D	2019	1	Unit
267	Laptop	Asus P1440	2020	1	Unit
268	PC A10 V222	Diskominfo	2020	1	Unit
269	printer epson L5190	Diskominfo	2020	1	Unit
270	printer Canon + Fax	Diskominfo	2020	1	Unit
271	Laptop	Asus FX 505 DY	2020	1	Unit
272	memory Card	Diskominfo	2020	5	Unit
273	Printer Canon	Diskominfo	2020	1	Unit
274	router hap	ROUTERBOARD	2020	1	Unit
275	wireles akses point	T- LINK	2020	2	Unit
276	laptop/note book	ASUS INTEL core i7	2020	1	Unit
277	Laptop	Acer	2020	1	Unit
278	Video Capture	HD606	2021	1	Unit
279	Router	RB1100 Series	2021	2	Unit
280	PC Dell Optiplex 3050	Dell Optiplex 3050	2021	2	Unit
281	PC.	Asus/V272	2021	1	Unit
282	Laptop	Acer	2021	1	Unit
283	printer	Epson	2021	3	Unit
284	Pengadaan PC	Acer	2021	2	Unit
285	Printer	Epson L3110	2021	2	Unit
286	Scanner	Epson GT-1500	2021	1	Unit
287	Printer Epson	epson L4150	2021	1	Unit
288	Lap Top	Dell Inspiron /3505	2021	2	Unit
289	Laptop	Acer Intel Core i3	2022	1	Unit
290	Modem 4G LTE	Orbit Max H1	2022	1	Unit
291	Refiater	All Prop W950 0,5 Watt	2022	2	Unit
292	Printer Scan	Epson L15160	2023	1	Unit
293	Laptop MSI Katana A15 AI	Bidang Aplikasi	2024	1	Unit



	BBV				
294	Printer Epson L15150	Bidang Sekretariat	2024	1	Unit
295	LAP TOP HP (Intel Insido) (14s-dq3109TU)	BIDANG KIP/RADIO PRAJA	2024	1	Unit
296	Payung Tenda	Payung	2018	5	Unit
297	Bangunan Gedung Kantor	Jln. Teratai Komplek Pemda Lambar	1996	1	Unit
298	Pemb. ruangan infokom dinas Perhubungan	Diskominfo	2015	1	Unit
299	Rumah genset	Diskominfo	2017	1	Unit
300	Tempat Parkir	Balik Bukit	2019	1	Unit
301	Instalasi Air Minum/Bersih	Dinas Kominfo	2008	1	Unit
302	Instalasi Listrik	Ruang Genset	2020	2	Unit
303	TEMPAT CUCI TANGAN	DINAS KOMINFO	2020	1	Unit
304	Jaringan Fiber Optik	Diskominfo	2021	1	Unit
305	Design Web	Diskominfo	2015	1	Unit
306	Software zimbra	Diskominfo	2016	1	Unit
307	Software Manajemen Dan Security	Diskominfo	2017	1	Unit
308	Aplikasi Sip-Online	Diskominfo	2017	1	Unit
309	Aplikasi Marketplace	UMKM	2022	1	Unit
310	Kursi Kerja R Sekretariat	Balik Bukit	2003	5	Unit
311	Kursi lipat	Balik Bukit	2011	1	Unit
312	Kursi putar	Balik Bukit	2011	2	Unit
313	Meja 1/2 biro	Balik Bukit	2011	1	Unit
314	Kursi Putar	Balik Bukit	2012	4	Unit
315	Tirai/Gorden	Balik Bukit	2012	1	Unit
316	Kursi Lipat	Balik Bukit	2012	2	Unit
317	Kursi Putar	Diskominfo	2013	1	Unit
318	Gordyn	Diskominfo	2016	6	Unit
319	Kursi Lipat	Diskominfo	2016	9	Unit
320	AC 1/2 PK	Diskominfo	2016	1	Unit
321	UPS 3000 W	Diskominfo	2016	1	Unit
322	CCTV	Diskominfo	2017	7	Unit
323	UPS	Diskominfo	2017	1	Unit
324	TV (60 inc)	Shap Aguos 153 Cm (60") Led BaclighTV	2018	1	Unit
325	LG TV 49	Igtv uj 632T	2018	1	Unit
326	UPS/STABILIZER inferter Dc-Ac	Diskominfo	2018	2	Unit
327	Kursi 1/2 Biro	RAKUDA	2018	6	Unit
328	Kursi Lipat	Poenik	2018	4	Unit
329	Power Suplay	Balik Bukit	2006	1	Unit
330	Pesawat Right	Balik Bukit	2013	2	Unit
331	Camera Digital	Diskominfo	2013	1	Unit
332	Kamera SLR Kit I	Balik Bukit	2014	1	Unit
333	Lensa Kamera SLR	Balik Bukit	2014	1	Unit
334	Speaker Sound System	Diskominfo	2018	1	Unit
335	Kamera	Canon EDS 80 D	2018	1	Unit
336	Drone	Dji Phantom 4 Pro	2018	1	Unit
337	Speaker Sound System	Panaray Sound Sistem	2018	1	Unit
338	Headphone	Diskominfo	2018	2	Unit
339	Telpon Seluler/HP	Balik Bukit	2019	1	Unit
340	Refeater	Balik Bukit	1997	1	Unit



341	Printer	Balik Bukit	2010	1	Unit
342	Komputer	Balik Bukit	2011	1	Unit
343	Printer PC	Diskominfo	2016	1	Unit
344	Printer	Diskominfo	2017	1	Unit
345	Komputer PC All In One	Me+	2018	2	Unit
346	PC All In One i5	Me+	2018	2	Unit
347	Hardisk External	Balik Bukit	2019	1	Unit
348	Laptop	Balik Bukit	2019	1	Unit
349	Printer Epson L3110	Balik Bukit	2019	1	Unit
350	Komputer/PC	Lenovo	2019	1	Unit
351	Laptop	Asus A 455 LD-WX 050 51,52 D	2019	1	Unit
352	Payung Tenda	Payung	2018	5	Unit
353	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Router CCR2004-1G- 12S+XS	2025	1	Unit
354	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Switch Core CRS326- 24S+2Q+RM	2025	1	Unit
355	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Switch Distribusi CRS309-1G-8S+In	2025	6	Unit
356	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Switch Akses Ruijie RG- ES206GS	2025	30	Unit
357	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2200	2025	1	Unit
358	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2201	2025	1	Unit
359	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2202	2025	1	Unit
360	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2203	2025	1	Unit
361	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2204	2025	1	Unit
362	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2205	2025	1	Unit
363	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2206	2025	1	Unit
364	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2207	2025	1	Unit
365	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2208	2025	1	Unit
366	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2209	2025	1	Unit
367	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2210	2025	1	Unit
368	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2211	2025	1	Unit
369	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2212	2025	1	Unit
370	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2213	2025	1	Unit
371	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2214	2025	1	Unit
372	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2215	2025	1	Unit
373	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2216	2025	1	Unit
374	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2217	2025	1	Unit



375	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2218	2025	1	Unit
376	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2219	2025	1	Unit
377	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2220	2025	1	Unit
378	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2221	2025	1	Unit
379	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2222	2025	1	Unit
380	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2223	2025	1	Unit
381	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2224	2025	1	Unit
382	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2225	2025	1	Unit
383	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2226	2025	1	Unit
384	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2227	2025	1	Unit
385	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2228	2025	1	Unit
386	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2229	2025	1	Unit
387	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2230	2025	1	Unit
388	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2231	2025	1	Unit
389	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2232	2025	1	Unit
390	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2233	2025	1	Unit
391	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2234	2025	1	Unit
392	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2235	2025	1	Unit
393	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2236	2025	1	Unit
394	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2237	2025	1	Unit
395	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2238	2025	1	Unit
396	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2239	2025	1	Unit
397	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2240	2025	1	Unit
398	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2241	2025	1	Unit
399	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2242	2025	1	Unit
400	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2243	2025	1	Unit
401	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2244	2025	1	Unit
402	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2245	2025	1	Unit
403	Peralatan Jaringan Intra	Akses Poin Ruijie	2025	1	Unit



	Pemerintah	REYEE RG-RAP2246			
404	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2247	2025	1	Unit
405	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2248	2025	1	Unit
406	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Akses Poin Ruijie REYEE RG-RAP2249	2025	1	Unit
407	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Rack INDORACK WIR5004S 19 Inch	2025	7	Unit
408	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Modul SFP Netlink SC 1G 10KM	2025	40	Unit
409	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Kabel LAN Commscope UTP Cat. 6 305M	2025	6	Unit
410	Peralatan Jaringan Intra Pemerintah	Kabel FO VASCOLINK 2 Core 3 Sling	2025	8	Unit
411	Komputer Pc AIO	Asus AIO P440VAT	2025	1	Unit
412	Laptop	Asus TUF A15	2025	1	Unit
413	Kursi Lipat Stainless Hitam	Phoenix	2025	15	Unit
414	Kursi Pejabat	Okelo	2025	1	Unit
415	Wireless Microphone System	Godox Cube	2025	1	Unit
416	Laptop	Asus TUF A16	2025	2	Unit
417	Komputer Pc AIO	Asus Expert Center	2025	1	Unit
418	Printer	Epson L5290	2025	1	Unit
419	Mixer Audio	Xenyx	2025	1	Unit
420	Swicher HDMI	Vention	2025	1	Unit
421	Kabel Audio	Canare	2025	1	Unit
422	Spliter HDMI	Vention	2025	1	Unit
423	Capture Card	Elgato	2025	1	Unit
424	Starlink Standard Actuated	Telkomsat	2025	1	Unit

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2025

Potensi dan kondisi sarana pendukung Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat sampai saat ini adalah :

1. Kendaraan Dinas Roda 4 : 4 Unit
2. Kendaraan Roda 2 : 6 Unit

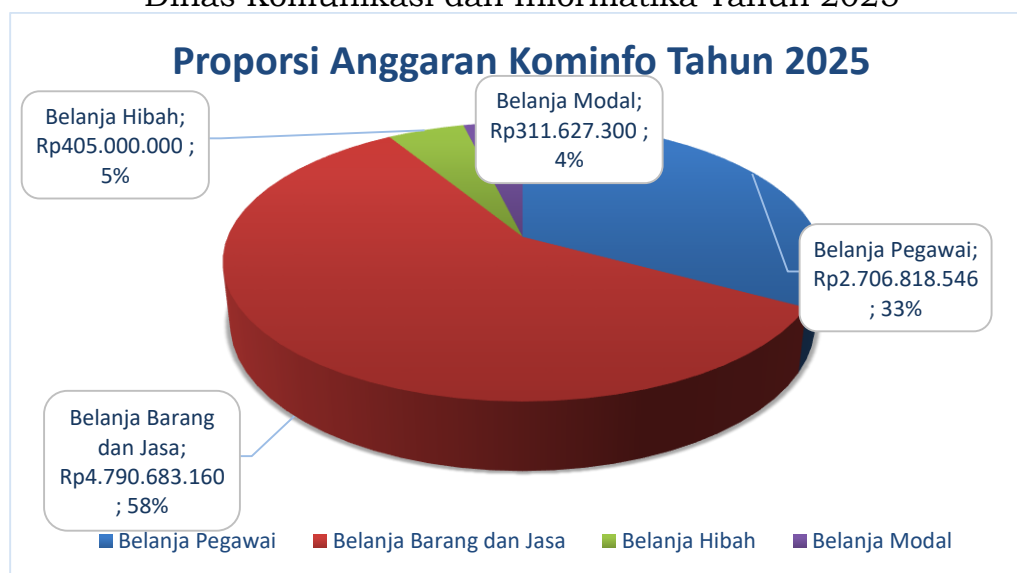
C. Analisis Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025

Dalam pencapaian kinerja yang sesuai dengan standar akuntabilitas harus mempunyai suatu ukuran sebagai sebuah *outcome* sebagai hasil sebuah kinerja sehingga terdapat suatu manfaat sehingga perlunya pengukuran kinerja itu sendiri dengan indikator indikator yang telah tersusun sesuai rencana yang diharapkan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat merupakan Badan Tipe B yang melaksanakan fungsi sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan dalam pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Lampung Barat telah melaksanakan 5 Program, 12 Kegiatan dan 41 sub kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Barat yaitu Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan dengan dukungan anggaran sebesar **Rp. 8.214.129.006 - (delapan milyar dua ratus empat belas juta seratus dua puluh sembilan ribu enam rupiah)**, - yang terdiri dari belanja operasi sebesar Rp. 7.902.501.706 dengan rincian belanja Pegawai sebesar Rp. 2.706.818.546, belanja barang dan jasa sebesar Rp 4.790.683.160, dan belanja hibah sebesar Rp. 405.000.000 dan belanja modal Rp. 311.627.300. Proporsi Anggaran Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah serta Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Gambar III-4 Proporsi Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025



Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2025

Adapun Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat pada Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel III-6 Pagu Anggaran
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah Anggaran
1	2	3
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3,073,607,243
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37,657,400
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19,150,200
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3,214,000
1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1,948,800
1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2,265,000
1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,575,500
1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1,170,000
1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6,333,900
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,620,071,883
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,616,465,883
2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1,344,000
2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1,085,000
2.4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1,177,000
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2,762,300
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2,762,300
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2,914,300
4.1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2,914,300
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215,026,800
5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,658,000
5.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84,835,000
5.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27,574,000
5.4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,060,000
5.5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12,064,800
5.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	82,835,000



No.	Uraian	Jumlah Anggaran
1	2	3
	SKPD	
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6,800,000
6.1.	Pengadaan Mebel	6,800,000
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71,766,000
7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,230,000
7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27,200,000
7.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42,336,000
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116,608,560
8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79,300,000
8.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27,318,560
8.3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9,990,000
B.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2,849,294,000
9.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2,849,294,000
9.1.	Relasi Media	2,145,964,400
9.2.	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	75,436,600
9.3.	Pelayanan Informasi Publik	460,934,600
9.4.	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	60,546,000
9.5.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	106,412,400
C.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1,101,439,500
10.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1,101,439,500
10.1.	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	13,968,000
10.2.	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	30,139,000
10.3.	Pembangunan dan/ atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	359,395,000



No.	Uraian	Jumlah Anggaran
1	2	3
10.4	Koordinasi dan Fasilitas Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	308,617,500
10.5	Penyediaan akses internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	389,320,000
D.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	131,425,400
11.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	131,425,400
11.1.	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	131,425,400
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	197,677,600
12.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	197,677,600
12.1.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	39,605,600
12.2.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	121,251,800
12.3.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36,820,200
Jumlah		Rp. 7,353,443,743

Sumber data : Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Perubahan Tahun 2025

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika, telah ditetapkan sebanyak 1 sasaran dan sebanyak 1 indikator kinerja (*outcomes*) dengan rincian sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS



Tewujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis digital

INDIKATOR SASARAN STRATEGIS



Nilai Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI)

A. Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi LHE Inspektorat

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk bertujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah Tahun 2024, Nomor 700/LHE-

71/II/2025, Inspektorat Kabupaten Lampung Barat telah melakukan reviu terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika. Hasil dari reviu yang telah dilaksanakan menghasilkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti guna menyempurnakan pelaporan kinerja perangkat daerah. Rencana tindak lanjut rekomendasi LHE AKIP tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV-1 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2024

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN
1	Menjadikan hasil pencapaian kinerja pegawai sebagai dasar penyesuaian pemberian/pengurangan Tunjangan Kinerja/Tambahan Penghasilan Pegawai, serta memaksimalkan penerapan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2025 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai dasar pemberian TPP.	Sebagai implementasi dari pemberian Reward dan Punishment maka dalam pembayaran tunjangan kinerja didasarkan pada Kinerja Pegawai dan Disiplin pegawai serta melakukan pemotongan tunjangan kinerja bagi pegawai yang kurang disiplin.	Pembayaran Tunjangan Kinerja berdasarkan Pengukuran Kinerja Pegawai	Tahun 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses Pelaksanaan
2	Pelaksana monev dilakukan oleh pegawai yang memiliki kompetensi dan mengikuti sosialisasi/diklat mengenai pengukuran dan pengumpulan realisasi data kinerja. Bagi Pegawai Eselon 2 dan 3 terlibat dalam pelaksanaan Monev.	Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja baik dari penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja dengan melibatkan Pejabat Eselon II dan III, serta Pejabat Fungsional dan Pejabat Eselon IV.	Terlaksananya monev kinerja dengan melibatkan Pejabat Eselon II dan III	Triwulan I, II, III dan IV Tahun 2025	Kepala Dinas	Telah dilaksanakan monev triwulan I dan II, dan dalam proses pelaksanaan untuk triwulan III dan IV
3	Dalam SK petunjuk teknis memuat informasi mengenai dasar, tujuan, tugas pokok, dan fungsi sesuai proses bisnis OPD disertai penjelasan IKU, Perjanjian Kinerja, dan monitoring evaluasi.	Melengkapi SK Petunjuk teknis dengan memuat informasi mengenai dasar, tujuan, tugas pokok, dan fungsi sesuai dengan proses bisnis OPD dengan disertai penjelasan IKU, Perjanjian Kinerja, dan Monitoring Evaluasi.	Tersusunnya SK Petunjuk Teknis	Tahun 2025	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Dalam Proses Pelaksanaan

NO	REKOMENDASI LHE 2024	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRESS PENYELESAIAN
4	Rumusan sasaran dan/atau indikatornya menjawab isu strategis secara komprehensif yang seharusnya dikawal ditingkat pimpinan Perangkat Daerah Bukan Hanya Menetapkan Kinerja : Nilai Indeks SPBE nya saja.	Akan dirumuskan dalam renstra 2025-2029	Terumuskannya IKU	Tahun 2025	Kepala Dinas	Dalam Proses Pelaksanaan
5	Pada Renja menuangkan Penjabaran kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya di LAKIP menjadi langkah perbaikan.	Menjabarkan kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya pada renja sebagai langkah perbaikan perencanaan pada tahun selanjutnya.	Tersusunnya Renja dengan disertai penjabaran kendala atas kinerja atau target yang tidak tercapai pada tahun sebelumnya	Setiap Tahun	Kasubbag Umum dan Perencanaan	Telah Dilaksanakan untuk tahun 2024 dan dalam proses pelaksanaan untuk tahun 2025

B. Capaian Kinerja

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel IV-2 Capaian Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Nilai Indeks PEMDI	Indeks	1,30	1,59	122

Sumber : Indikator Kinerja Utama Kominfo Tahun 2025

Berdasarkan Tabel IV-1 bahwa capaian kinerja sasaran strategis Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang berbasis digital pada Tahun 2025 dengan indikator keberhasilan adalah Nilai Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) telah mencapai dan melampaui target yang ditetapkan dengan target sebesar 1,30 terealisasi sebesar 1,59, dengan persentase capaian sebesar 122%. Berdasarkan hasil Laporan Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025 dalam

kategori **Kurang**.

Tahun 2025 merupakan tahun peralihan dari penilaian Nilai Indeks SPBE menjadi penilaian Pemerintahan Digital. Sehingga terjadi perubahan target dari tahun sebelumnya dengan perbandingan ‘setengah’ dari target tahun 2025. Sehubungan dengan perubahan tersebut, Kabupaten Lampung Barat memiliki sejumlah keunggulan dalam penerapan SPBE dalam menunjang pencapaian indeks pemdi.

Keunggulan Penerapan SPBE Kabupaten Lampung Barat adalah pada Penerapan Aspek sebagai berikut :

a. Aspek Kebijakan SPBE

Kabupaten Lampung Barat memiliki keunggulan yang sangat menonjol pada aspek kebijakan SPBE dengan nilai 4,20. Pemerintah Daerah telah menetapkan berbagai kebijakan internal SPBE secara lengkap dan komprehensif, meliputi kebijakan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi, Keamanan Informasi, Audit TIK, serta pembentukan Tim Koordinasi SPBE. Tingginya tingkat kematangan kebijakan ini mencerminkan komitmen pimpinan daerah yang kuat dalam menyediakan landasan regulasi sebagai dasar penyelenggaraan SPBE yang terarah dan berkelanjutan.

b. Aspek Tata Kelola SPBE

Pada aspek tata kelola SPBE, Kabupaten Lampung Barat telah memiliki perencanaan strategis SPBE serta keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran yang cukup baik. Struktur tata kelola dan peran penyelenggara SPBE telah terbentuk, sehingga menjadi fondasi awal dalam pengendalian dan koordinasi penerapan SPBE lintas perangkat daerah.

c. Aspek Manajemen SPBE

Keunggulan pada aspek manajemen SPBE terlihat dari mulai diterapkannya audit TIK serta pengelolaan risiko SPBE. Pelaksanaan audit infrastruktur dan aplikasi SPBE menunjukkan adanya upaya pengawasan dan pengendalian internal guna menjaga keberlangsungan dan keandalan sistem elektronik pemerintahan.

d. Aspek Layanan SPBE

Aspek layanan SPBE menjadi salah satu kekuatan utama Kabupaten Lampung Barat dengan nilai 3,75. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, seperti perencanaan, penganggaran, keuangan, kepegawaian, pengadaan barang dan jasa, serta kearsipan dinamis telah berjalan dengan baik. Selain itu, layanan publik berbasis elektronik, termasuk layanan pengaduan masyarakat, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), serta layanan publik sektoral, telah memberikan

manfaat nyata bagi masyarakat.

1. Faktor-faktor Penghambat Capaian Kinerja SPBE

Pada Tahun 2025, pelaksanaan penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dilaksanakan dalam bentuk pemantauan. Sehubungan dengan hal tersebut, teknis penilaian tidak dapat dijabarkan secara rinci sebagaimana mekanisme evaluasi pada periode sebelumnya. Hal ini disebabkan karena laporan hasil penilaian yang disampaikan hanya memuat hasil capaian nilai secara umum, tanpa dilengkapi dengan uraian yang lebih spesifik terkait aspek-aspek yang menjadi faktor penghambat maupun faktor penguangkit terhadap peningkatan nilai SPBE. Dengan demikian, analisis mendalam terhadap komponen penilaian belum dapat dilakukan secara komprehensif. Berikut adalah faktor-faktor penghambat capaian kinerja SPBE :

a. Aspek Kebijakan

Meskipun kebijakan SPBE telah tersedia secara lengkap, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal di seluruh perangkat daerah. Sebagian kebijakan masih memerlukan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk standar operasional prosedur (SOP) dan pedoman teknis yang seragam.

b. Aspek Tata Kelola

Hambatan utama pada aspek tata kelola terletak pada belum matangnya implementasi Arsitektur SPBE secara operasional, rendahnya inovasi proses bisnis berbasis SPBE, serta belum optimalnya pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan untuk mendukung interoperabilitas antar aplikasi dan data.

c. Aspek Manajemen SPBE

Aspek manajemen SPBE merupakan tantangan terbesar, khususnya terkait keterbatasan kompetensi sumber daya manusia SPBE, belum optimalnya manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, serta manajemen layanan SPBE. Kondisi ini menyebabkan penerapan SPBE masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses bisnis pemerintahan.

d. Aspek Layanan SPBE

Pada aspek layanan, tantangan yang dihadapi adalah belum optimalnya integrasi data antar layanan serta masih adanya layanan

aplikasi yang berjalan secara terpisah (silo), sehingga efektivitas layanan digital belum maksimal.

2. Faktor-faktor Keberhasilan Capaian Kinerja

Beberapa hal yang menjadi keberhasilan capaian kinerja pada sasaran sebagai berikut :

a. Aspek Kebijakan dan Kepemimpinan

Keberhasilan penerapan SPBE Kabupaten Lampung Barat didukung oleh komitmen pimpinan daerah dalam menetapkan dan mengawal kebijakan SPBE, serta keselarasan kebijakan daerah dengan kebijakan nasional.

b. Aspek Tata Kelola dan Perencanaan

Tersedianya perencanaan strategis SPBE serta keterpaduan rencana dan anggaran menjadi faktor penting dalam menjaga kesinambungan program SPBE.

c. Aspek Pengawasan dan Pengendalian

Pelaksanaan audit TIK dan manajemen risiko SPBE menjadi faktor pendukung dalam memastikan keamanan, keandalan, dan keberlanjutan layanan SPBE.

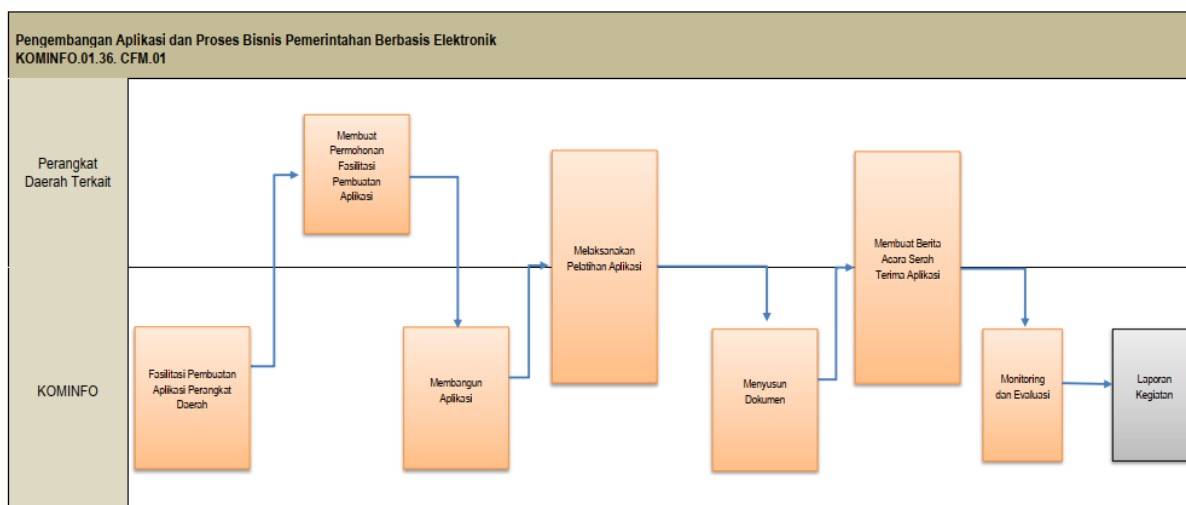
d. Aspek Layanan dan Kebutuhan Publik

Dorongan kebutuhan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang cepat, transparan, dan mudah diakses menjadi faktor pendorong utama keberhasilan penerapan SPBE, khususnya pada aspek layanan.

3. Gambaran Peta Proses Bisnis Pendukung Capaian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018, peta proses bisnis berupa diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.

Gambar IV-1 Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika Sub Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik



Sumber Data : Peta Proses Bisnis Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peta Proses Bisnis di atas terlihat bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki hubungan kerja dengan perangkat daerah lain dalam proses pembuatan aplikasi pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika memfasilitasi pembuatan aplikasi berdasarkan surat permohonan dari perangkat daerah terkait. Kemudian Dinas Komunikasi dan Informatika akan membangun aplikasi dan melaksanakan pelatihan kepada perangkat daerah terkait hingga proses akhir dengan diterbitkannya laporan kegiatan.

Rangkaian proses dalam proses bisnis di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peta Proses Bisnis Utama yang harus dilaksanakan guna mendukung SPBE Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.

Guna mencapai Peta Proses Bisnis Utama dan Peta Proses Bisnis Pendukung diperlukan dukungan Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat agar meningkatnya nilai indeks PEMDI dalam upaya pemerintah meningkatkan pengembangan teknologi dan Informasi, penyediaan informasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai bagi masyarakat dalam mengakses layanan dan keterbukaan informasi bagi dunia usaha.

C. Perbandingan Kinerja

1. Perbandingan Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Capaian indeks SPBE Tahun 2023, 2024 dan 2025 dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar IV-2 Capaian indeks SPBE Tahun 2023, 2024 dan 2025

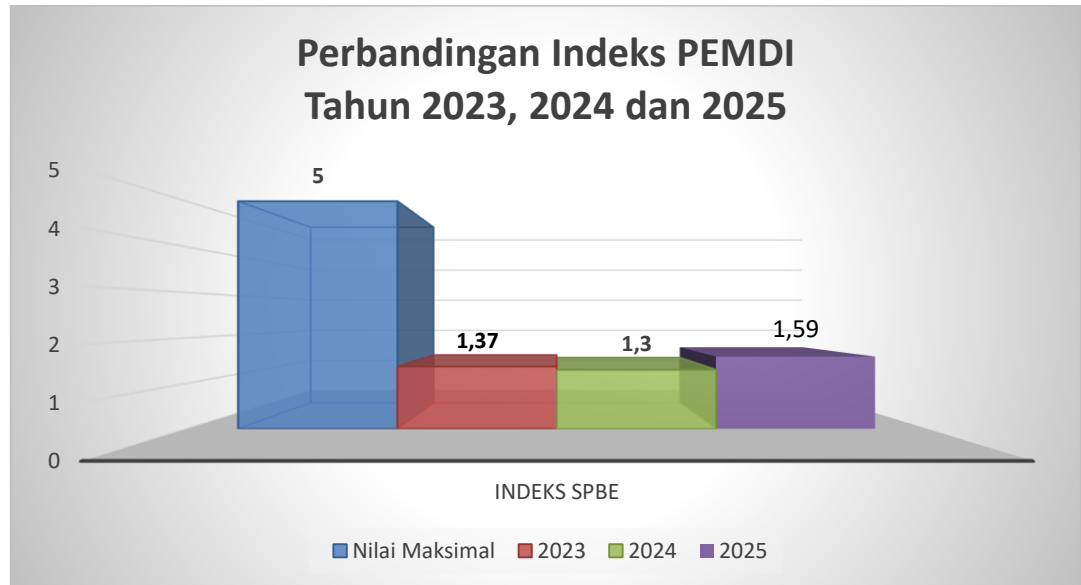


Sumber Data : LHP SPBE Tahun 2023, 2024 dan 2025

Berdasarkan grafik di atas, Capaian indeks SPBE mengalami kenaikan pada tahun 2025 dibandingkan nilai indeks SPBE sebelumnya dengan capaian indeks SPBE pada tahun 2023 sebesar 2,75 dan tahun 2024 sebesar 2,62 menjadi 3,19 pada Tahun 2025 dengan kategori **BAIK**.

Peralihan penilaian dari nilai indeks SPBE menjadi indeks Pemerintahan Digital pada tahun 2025, menjadikan target maupun realisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami perubahan dengan target dan realisasi sebesar 'setengah' dari nilai yang diperoleh dalam indeks SPBE. Perbandingan nilai indeks PEMDI dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar IV-3. Capaian indeks PEMDI Tahun 2023, 2024 dan 2025



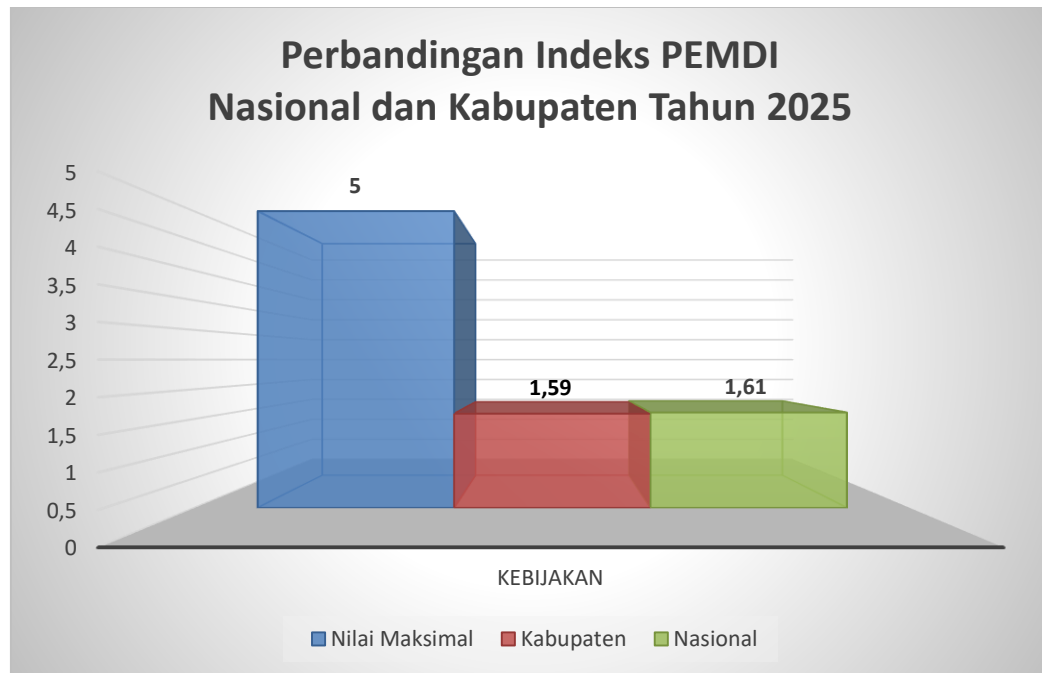
Sumber Data : LHP SPBE Tahun 2023, 2024 dan 2025

Berdasarkan grafik di atas, capaian nilai indeks PEMDI tahun 2023 sebesar 1,37 poin. Namun terjadi penurunan pada tahun 2024 dengan nilai indeks PEMDI sebesar 1,30 poin, terjadi penurunan sebesar 0,07 poin. Pada tahun 2025 nilai Indeks PEMDI pada Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami peningkatan jika dibandingkan dua tahun sebelumnya dengan capaian 1,59 poin dengan kategori **Kurang (1 s.d. < 1,8)**.

2. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Nasional

Perbandingan capaian Indeks PEMDI Nasional dan Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar IV-4. Perbandingan Indeks PEMDI Nasional dan Kabupaten Tahun 2025



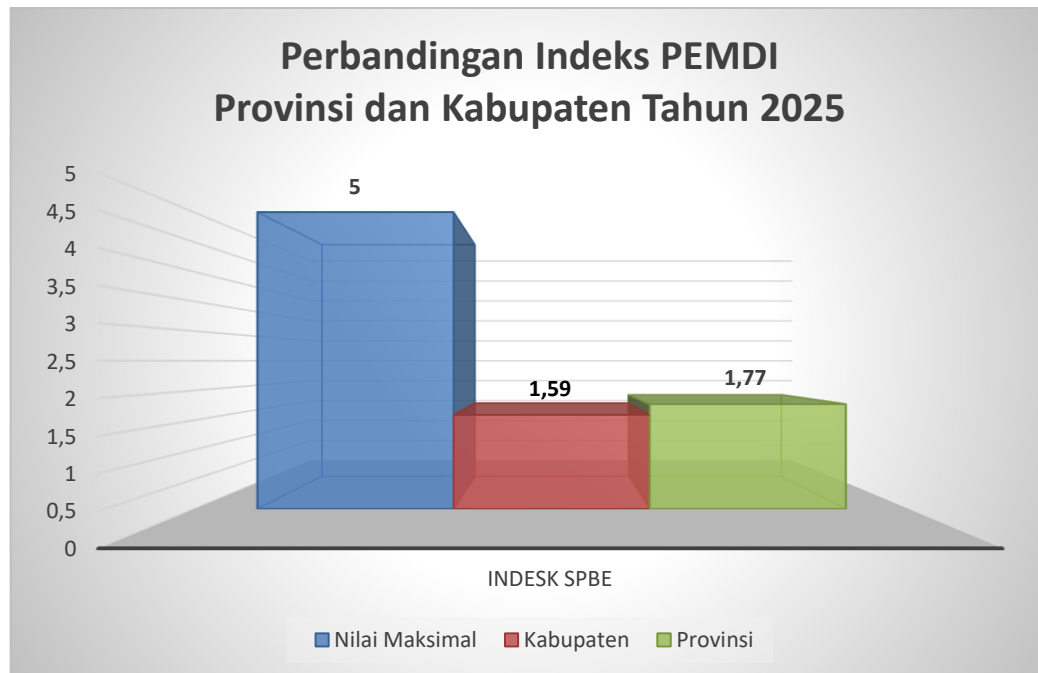
Sumber Data : LHP SPBE Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat perbandingan antara capaian indeks PEMDI Nasional dan Indeks PEMDI Kabupaten dengan capaian sebesar 1,61 dan 1,59. Hasil pengukuran capaian kinerja ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Barat masih belum bisa mencapai atau melebihi capaian Nasional namun jika merujuk pada capaian kategori indeks PEMDI capaian Kabupaten sama dengan capaian Nasional dengan kategori **Kurang**.

3. Perbandingan Kinerja dengan Capaian Provinsi

Perbandingan capaian Indeks PEMDI Provinsi dan Kabupaten Lampung Barat dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar IV-5. Perbandingan Indeks PEMDI Provinsi dan Kabupaten Tahun 2025



Sumber Data: LHP SPBE Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat perbandingan antara capaian indeks PEMDI Provinsi dan Indeks PEMDI Kabupaten dengan capaian sebesar 1,77 dan 1,59. Hasil pengukuran capaian kinerja ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Barat masih belum bisa mencapai atau melebihi capaian Provinsi namun sama halnya dengan perbandingan antar Nasional dan Kabupaten, jika merujuk pada capaian kondisi indeks PEMDI capaian Kabupaten sama dengan capaian Provinsi dengan kategori **Kurang**.

D. Benchmarking

Benchmark adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris di mana memiliki arti patokan atau tolak ukur. Dengan demikian, pengertian *benchmark* adalah patokan untuk menilai atau membandingkan sesuatu. *Benchmarking* diartikan sebagai suatu standar yang dimanfaatkan sebagai

pembandingan antara satu hal dengan lainnya yang sejenis. Jadi, dengan adanya patokan ini maka berbagai hal dapat diukur dengan standar baku yang umum.

Tabel IV-3. Indeks SPBE se-Provinsi Lampung Tahun 2025

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Provinsi Lampung	4,15	Sangat Baik
2.	Mesuji	4,07	Sangat Baik
3.	Metro	3,68	Sangat Baik
4.	Pesawaran	3,64	Sangat Baik
5.	Tanggamus	3,58	Sangat Baik
6.	Way Kanan	3,52	Sangat Baik
7.	Pesisir Barat	3,51	Sangat Baik
8.	Tulang Bawang	3,38	Baik
9.	Lampung Selatan	3,34	Baik
10.	Lampung Utara	3,26	Baik
11.	Bandar Lampung	3,21	Baik
12.	Lampung Barat	3,19	Baik
13.	Pringsewu	3,04	Baik
14.	Lampung Timur	2,84	Baik
15.	Lampung Tengah	2,68	Baik
16.	Tulang Bawang Barat	2,62	Baik

Sumber: Surat Keputusan Menteri PANRB tentang Hasil Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2025

Berdasarkan gambar di atas, nilai indeks PEMDI diperoleh dengan membagi 'setengah' nilai Indeks SPBE dimana Nilai Indeks SPBE Pemerintah Kabupaten Lampung Barat sebesar 3,19 poin atau 1,59 poin untuk nilai Indeks PEMDI. Capaian kinerja Indeks SPBE Kabupaten Lampung Barat yang telah diukur oleh KemenpanRB pada Tahun 2025 berdasarkan pengukuran mendapatkan nilai sebesar 3,19 poin dengan kategori **BAIK**, dengan rincian capaian kinerja pada setiap dimensi yaitu Domain Kebijakan SPBE 4,20, Domain Tata Kelola SPBE 2,50, Domain Manajemen SPBE 1,91, dan Domain Layanan SPBE 3,75. Sedangkan hasil pengukuran Indeks PEMDI mendapatkan nilai sebesar 1,59 poin dengan

kategori **KURANG**. Nilai Indeks PEMDI dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV-4. Indeks PEMDI se-Provinsi Lampung Tahun 2025

No	Nama Instansi	Indeks	Predikat
1.	Provinsi Lampung	2,07	Sangat Baik
2.	Mesuji	2,03	Sangat Baik
3.	Metro	1,84	Sangat Baik
4.	Pesawaran	1,82	Sangat Baik
5.	Tanggamus	1,79	Sangat Baik
6.	Way Kanan	1,76	Sangat Baik
7.	Pesisir Barat	1,75	Sangat Baik
8.	Tulang Bawang	1,69	Baik
9.	Lampung Selatan	1,67	Baik
10.	Lampung Utara	1,63	Baik
11.	Bandar Lampung	1,60	Baik
12.	Lampung Barat	1,59	Baik
13.	Pringsewu	1,52	Baik
14.	Lampung Timur	1,42	Baik
15.	Lampung Tengah	1,34	Baik
16.	Tulang Bawang Barat	1,31	Baik

Sumber: Data Pengolahan Indeks SPBE se-Provinsi Lampung Tahun 2025.

Berdasarkan hasil pengukuran pada tahun 2025, Kabupaten Lampung Barat berada di posisi ke-12 se-Provinsi Lampung. Dengan Hasil pengukuran ini menunjukkan bahwa Kabupaten Lampung Barat mengalami peningkatan tiga peringkat dibandingkan tahun 2024 dimana Kabupaten Lampung Barat menempati urutan ke-15 se-Provinsi Lampung. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengungguli Pemerintah Kabupaten Pringsewu, Lampung Timur, Lampung Tengah, dan Tulang Bawang Barat.

E. Realisasi Anggaran

Untuk mengukur sejauh mana sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2025 dengan Anggaran sebesar **Rp. 7.353.443.743- (tujuh milyar tiga ratus lima puluh tiga juta empat ratus empat**

puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah) dan pencapaian realisasi keuangan dari seluruh kegiatan **Rp. 7.075.617.239,- (tujuh milyar tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah)** atau **96,22%**, terlebih dahulu dijelaskan bahwa selain Indikator Kinerja Utama yang menjadi dasar atau tolak ukur capaian hasil kinerja, evaluasi kinerja juga menggunakan metode kuantitatif berdasarkan data pilihan dari tiap indikator yang relevan dalam mencapai sasaran. Adapun rincian program/kegiatan sub kegiatan yang telah dikerjakan dan direalisasikan sebagai berikut:

Tabel IV-5. Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.073.607.243,00	2.933.694.856,00	95,45%
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.657.400,00	37.648.400,00	99,98%
1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	19.150.200,00	19.141.200,00	99,95%
1.2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.214.000,00	3.214.000,00	100%
1.3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.948.800,00	1.948.800,00	100%
1.4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.265.000,00	2.265.000,00	100%
1.5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3.575.500,00	3.575.500,00	100%
1.6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.170.000,00	1.170.000,00	100%
1.7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.333.900,00	6.333.900,00	100%
2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.620.071.883,00	2.501.284.334,00	95,47%
2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.616.465.883,00	2.497.678.334,00	95,46%
2.2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.344.000,00	1.344.000,00	100%
2.3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.085.000,00	1.085.000,00	100%
2.4.	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.177.000,00	1.177.000,00	100%
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.762.300,00	2.762.300,00	100%



No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2.762.300,00	2.762.300,00	100%
4.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.914.300,00	2.914.300,00	100%
4.1.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2.914.300,00	2.914.300,00	100%
5.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	215.026.800,00	211.007.628,00	98,13%
5.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.658.000,00	4.658.000,00	100%
5.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	84.835.000,00	83.739.500,00	98,71%
5.3.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	27.574.000,00	25.122.000,00	91,11%
5.4.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3.060.000,00	3.060.000,00	100%
5.5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	12.064.800,00	12.064.800,00	100%
5.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	82.835.000,00	82.363.328,00	99,43%
6.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6.800.000,00	6.800.000,00	100%
6.1	Pengadaan Mebel	6.800.000,00	6.800.000,00	100%
7.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	71.766.000,00	60.354.688,00	84,10%
7.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.230.000,00	1.630.000,00	73,09%
7.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.200.000,00	17.428.688,00	64,08%
7.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	42.336.000,00	41.296.000,00	97,77%
8.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.608.560,00	110.923.206,00	95,12%
8.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79.300.000,00	78.833.206,00	99,41%
8.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.318.560,00	22.100.000,00	80,90%
8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	9.990.000,00	9.990.000,00	100%



No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
B.	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.849.294.000,00	2.755.036.819,00	96,69%
9.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.849.294.000,00	2.755.036.819,00	96,69%
9.1.	Relasi Media	2.145.964.400,00	2.084.866.266,00	97,15%
9.2.	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	75.436.600,00	74.706.100,00	99,03%
9.3.	Pelayanan Informasi Publik	460.934.600,00	442.047.568,00	95,90%
9.4.	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini dan Aspirasi Publik	60.546.000,00	50.145.842,00	82,82%
9.5.	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	106.412.400,00	103.271.043,00	97,05%
C.	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	1.101.439.500,00	1.083.711.804,00	98,39%
10.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.101.439.500,00	1.083.711.804,00	98,39%
10.1.	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional	13.968.000,00	13.442.847,00	96,24%
10.2.	Fasilitas Penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	30.139.000,00	30.129.700,00	99,97%
10.3.	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	359.395.000,00	359.344.900,00	99,99%
10.4.	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	308.617.500,00	292.580.763,00	94,80%
10.5.	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam Rangka Penyelenggaraan SPBE	389.320.000,00	388.213.594,00	99,72%
D.	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	131.425.400,00	129.639.900,00	98,64 %
11.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	131.425.400,00	129.639.900,00	98,64 %
11.1.	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	131.425.400,00	129.639.900,00	98,64 %
E.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	197.677.600,00	173.533.860,00	87,79 %
12.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	197.677.600,00	173.533.860,00	87,79 %
12.1.	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya	39.605.600,00	37.307.501,00	94,20%

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	%
1	2	3	4	5
	Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
12.2.	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	121.251.800,00	103.566.159,00	85,41%
12.3.	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	36.820.200,00	32.660.200,00	88,70%
Jumlah		7.353.443.743,00	7.075.617.239,00	96,22%

Sumber Data : Laporan Realisasi Keuangan Kominfo Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat sepanjang Tahun Anggaran 2025 telah melaksanakan program kegiatan dan sub kegiatan dengan capaian memuaskan yang terlihat dari pencapaian indikator rata-rata 90% s.d. 100%.

F. Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan Rencana Kerja (Renja) Tahun Anggaran 2025.

Laporan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.

G. Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi LHE Nasional

BAB V PENUTUP

A. Simpulan Umum

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, formasi dan pengembangan pegawai, perpindahan pegawai, pendistribusian dan kegiatan lainnya diwujudkan ke dalam indikator kinerja.

Dalam tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat menetapkan sebanyak 1 (satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan yaitu sasaran 1 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100%. Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 1 sasaran tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

B. Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Hasil Pemantauan SPBE oleh Kemenpan-RB Tahun 2025 pada Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan peningkatan pada nilai Indeks SPBE dengan predikat **BAIK**. Nilai Indeks SPBE tahun 2025 sebesar 3,19 poin, meningkat sebesar 0,57 poin dibandingkan dengan tahun 2024 dengan nilai Indeks SPBE 2,62 poin. Pencapaian ini disebabkan beberapa indikator yang belum dapat dicapai pada tahun 2024 telah berhasil dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, salah satunya dengan telah disusunnya Dokumen Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE.

C. Permasalahan dan Solusi

Dalam penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan, tentu saja banyak permasalahan dan hambatan yang dihadapi Kominfo, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel V-1 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan		Solusi
1.	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum melaksanakan (atau mendokumentasikan) Pembangunan Aplikasi SPBE sesuai dengan tahapan SDLC	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat harus membuat kebijakan turunan terkait Pembangunan Aplikasi SPBE dengan tahapan SDLC
2.	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum menerapkan sistem penghubung layanan berbasis API	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menerapkan sistem penghubung layanan berbasis API dan mencakup seluruh unit kerja
3.	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum menerapkan Manajemen SPBE	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat menerapkan Manajemen SPBE
4.	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat belum melaksanakan Audit terhadap Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan SPBE	Pemerintah Kabupaten Lampung Barat melaksanakan Audit terhadap Aplikasi, Infrastruktur dan Keamanan SPBE

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun Dinas Komunikasi dan Informatika telah menggunakan anggaran sebesar **Rp. 7.075.617.239 - (tujuh milyar tujuh puluh lima juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah)** telah berupaya mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat adalah 96,22% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Lampung Barat.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Barat kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Lampung Barat.



Lwa, 30 Januari 2026

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lampung Barat,

BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.

Pembina Utama Muda

NIP 197109241998031005



LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG APTIKA 2025

RAPAT PEMBAHASAN BLANK SPOT SE-PROVINSI LAMPUNG



BANTUAN AKSES INTERNET DI KECAMATAN BELALAU



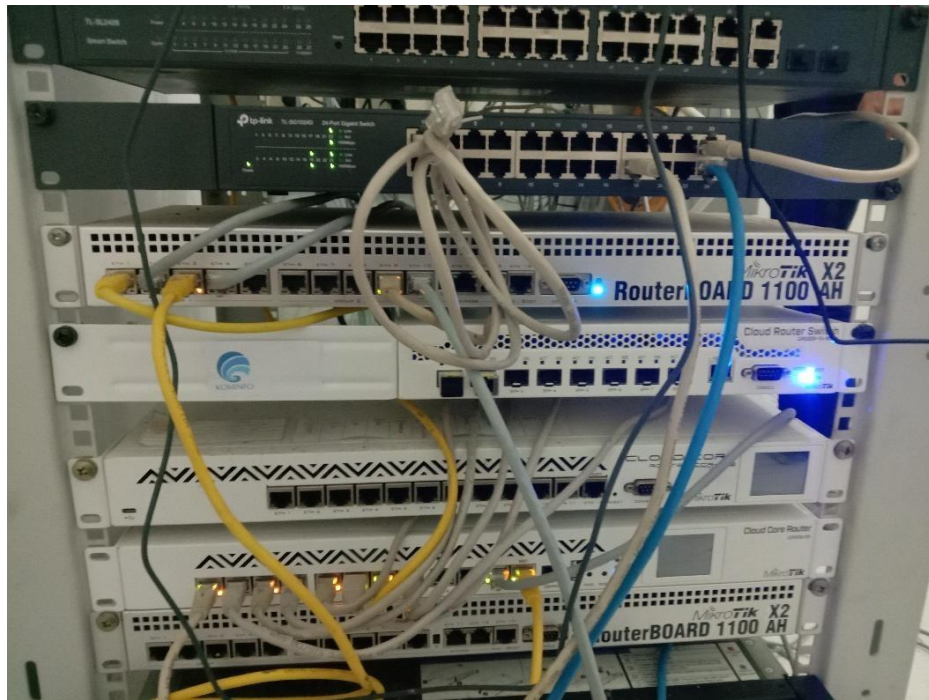
RAPAT PEMBAHASAN JARINGAN INTRA KE PT TELKOM WITEL LAMPUNG



PEMASANGAN PERANGKAT STARLINK SEBAGAI AKSES INTERNET PUBLIK DI PASAR TEMATIK WISATA LUMBOK SEMINUNG



IMPLEMENTASI JARINGAN INTRA DI LINGKUNGAN PEMDA





PENERTIBAN PENDIRIAN TOWER TELEKOMUNIKASI DI KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG



RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI TERKAIT PEMANTAUAN SPBE KE DISKOMINFO TIK PROVINSI LAMPUNG



KOORDINASI TERKAIT MANAJEMEN JARINGAN INTRA PEMERINTAH KE PT TELKOM WITEL LAMPUNG





KOORDINASI TERKAIT PEMANFAATAN PDN KE MENKOMDIGI





DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG KIP 2025

DOKUMENTASI PODCAST DIALOG INTERAKTIF JAKSA MENYAPA TAHUN 2025



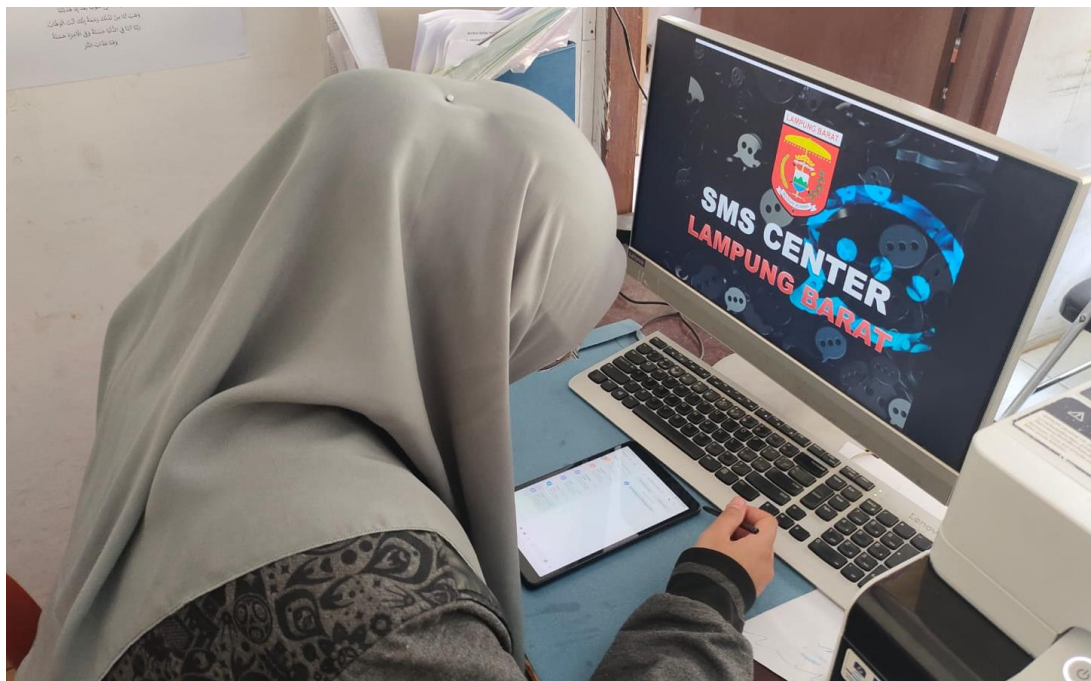


DOKUMENTASI PEMASANGAN BALIHO UNTUK ACARA HARI BESAR





DOKUMENTASI PELAYANAN SMS / WA CENTER



DOKUMENTASI PENERIMAAN PENGHARGAAN KATEGORI INFORMATIF DARI



KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG



DOKUMENTASI PENGELOLAAN VIDEOTRON





DOKUMENTASI KEGIATAN PEMBUATAN RILIS BERITA PADA WEBSITE PEMERINTAH



DOKUMENTASI PEMASANGAN SPANDUK DAN BALIHO



DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI DARING TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG





DOKUMENTASI KEGIATAN BIDANG STASAN 2025

KEGIATAN CETAK BUKU LBDA, PDRB DAN BUKU STATISTIK SEKTORAL
TA. 2025





DOKUMENTASI KEGIATAN RAPAT STATISTIK TA. 2025





DOKUMENTASI KEGIATAN SOSIALISASI ITSA
(*INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY ASSESSMENT*) TA. 2025





DOKUMENTASI KEGIATAN KONTRA PENGINDRAAN TA. 2025



